**BAB II**

**SANKSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA KEPADA IRAK**

1. **Profil Negara Irak**

 Republik Irak (Al Jumhuriyah al Iraqiyah) (Al Iraq) adalah sebuah Negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan , Yordania di Barat, Suriah di Barat Laut, Turki di Utara, dan Iran di Timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia. Irak mempunyai luas wilayah 167.975 mill, dengan beriklum tropis dan suhu rata-rata 48C. Pada bulan Juli – Agustus merupakan musim hujan sedangkan September – Juni merupakan musim Kemarau.

 Irak beribukotakan Baghdad. Bentuk Pemerintahan Irak yaitu Republik yang dipimpin oleh Presiden. Irak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasional mereka. 75-80% penduduk Irak adalah bangsa Arab kelompok etnis utama lainnya adalah Kurdi (15-20%), Asiria, Turkmen Irak (5%) sebagian besar dari mereka tinggal di Utara dan Timur laut negeri. Kelompol lainnya adalah orang Persia dan Armenia (kemungkinan keturunan budaa Mesopotamia kuno). Perkiraan 25.000-65.000 orang Arab Marsh tinggal di selatan Irak. [[1]](#footnote-1)

 Hampir semua orang Irak berbicara dan mengerti bahasa resminya, bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Semit, diperkenalkan oleh para penakluk Arab dan memiliki tiga bentuk yang berbeda: klasik, standar modern, dan lisan. Bahasa Arab klasik, yang paling dikenal oleh para ilmuwan, adalah bahasa tulisan Alquran.Standar bahasa Arab modern, yang memiliki struktur yang hampir sama di semua negara berbahasa Arab, diajarkan di sekolah untuk membaca dan menulis. Bahasa lisan adalah bahasa Arab Irak, dan sangat mirip dengan yang diucapkan di Suriah, Lebanon, dan sebagian Yordania. Mereka yang pergi ke sekolah belajar bahasa Arab Standar Modern, dan banyak yang tidak bersekolah cenderung setidaknya memahaminya. Perbedaan utama antara standar modern dan bahasa Arab Irak adalah perubahan dalam bentuk kata kerja, dan kesederhanaan keseluruhan dalam tata bahasa bahasa Arab yang diucapkan.

 Kurdi adalah bahasa resmi di Kurdistan, dan berfungsi untuk membedakan Kurdi dari orang-orang Irak lainnya. Ini bukan asal Semit atau dialek Arab atau Persia, tapi bahasa yang berbeda dari keluarga Indo-Eropa. Bahasa minoritas lainnya termasuk bahasa Aram, Turki, Armenia, dan Persia.

 Pemerintahan Arab selama periode abad pertengahan memiliki dampak budaya terbesar terhadap Irak modern. Budaya yang mendominasi di Irak adalah Arab, dan kebanyakan orang Arab beragama Islam. Muslim Irak terbagi menjadi dua kelompok, kaum Sunni dan Syiah (Syiah). Kaum Sunni, mayoritas di Islam, adalah minoritas di Irak, dan Syiah, minoritas di dunia Arab, adalah mayoritas di Irak. Antara Muslim Syiah dan Sunni, kesetiaan terhadap Irak telah menjadi faktor umum. Meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, baik Sunni maupun Syiah memegang posisi kepemimpinan tinggi di pemerintahan (termasuk Saddam Hussein Sunni), seperti juga beberapa orang Kristen.

 Budaya Arab, yang dipengaruhi oleh para penakluk di abad ketujuh, bertahan banyak perubahan kekuasaan selama berabad-abad, dan berhasil tetap berpengaruh. Pada abad kesembilan belas, sementara Kekaisaran Ottoman berfokus pada "Turkifikasi" rakyatnya, pemberontak di Mesopotamia sedang membangun gerakan nasionalis Arab mereka. Mereka diberi kesempatan untuk bertindak selama Perang Dunia I, ketika Inggris setuju untuk mengakui kemerdekaan Arab di Mesopotamia jika mereka membantu memerangi orang-orang Turki. Meskipun Irak tunduk pada peraturan mandat Inggris setelah kekalahan Kekaisaran Ottoman, nasionalisme Arab berdiri kokoh. Selama beberapa dekade berikutnya, bahkan setelah merdeka dari Inggris, sikap pemerintah goyah antara nasionalis pro-Inggris dan Arab. Hari ini Irak teguh dalam kepercayaannya terhadap nasionalisme pro-Arab.

 Pemerintahan Irak adalah sebuah republik yang terbagi menjadi delapan belas provinsi, yang terbagi menjadi kabupaten. Ada Majelis Nasional yang dipilih setiap empat tahun, dan mereka bertemu dua kali setiap tahun dan bekerja dengan Dewan Komando Revolusioner (RCC) untuk membuat keputusan legislatif. RCC memegang otoritas tertinggi atas keputusan legislatif, dan ketua RCC juga merupakan presiden negara tersebut. Presiden menjalankan semua kekuatan pengambilan keputusan eksekutif, dan dia serta wakil presiden dipilih oleh dua pertiga suara mayoritas RCC. Ada hak pilih universal pada usia delapan belas tahun, dan pemilihan umum memilih 220 dari 250 kursi di Majelis Nasional. Presiden memilih 30 kursi yang tersisa, yang termasuk ke tiga provinsi Kurdistan.[[2]](#footnote-2)

1. **Berjalannya Invasi Irak terhadap Kuwait**
2. **Latar Belakang Irak Melakukan Invasi Terhadap Kuwait**

Salah satu latar belakang mengapa Irak melakukan Invasi terhadap Kuwait yaitu perang saudara yang tejadi antara irak dan iran yang berlangsung kurang lebih 8 tahun lamanya perang ini terjadi karena pada waktu itu irak ingin melingdungi Kuwait yang mayoritas syiah dari irak yang mayoritas suni.

 Perang Irak – Iran juga dilatarbelakangi permasalahan lama yaitu perebutan hegemoni sebagai penguasa di kawasan Teluk Persia. Dalam perang ini tidak ada yang menang mau ada yang kalah akan tetapi perang ini berdampak buruk pada perekonomian di irak sehingga irak harus berhutang ke negara tetangga untuk membantu perekonomian di irak dan bahakan untuk menutupi hutang-hutang yang dialami irak pasca menagalami perang dengan iran. Dengan krisis seperti ini inilah irak pasca perang dengan iran pada tahun 1988 melakukan berbagai cara untuk menutupi hutang-hutangnya salah satu cara ialah dengan miminjam bantuan dana ke kuwait akan tetapi Kuwait menolaknya karena irak sebelumnya juga sudah meminjam dana ke Kuwait alhasil presiden irak yang dipimpin saddam husein pada kala itu marah terhadap Kuwait sehingga irak mempunya renacana untuk mengambil alih negara Kuwait dan juga ingin menguasai ladang minyak yang ada di Kuwait.

 Melihat sumber daya yang melimpah di Kuwait akhirnya irak memutuskan untuk megirim pasukannya untuk menyerang Kuwait dan mengabil alih Kuwait inilah puncak kemarahan saddam husein. Irak terus menguasai Kuwait kurang lebih dua hari dan membuat kepala negara beserta rakyat Kuwait mengungsi ke arab Saudi. Tindakan invasi irak terhadap Kuwait ini menuai banyak kecaman dari pihak negara lain yang sangat dirugikan dengan adanya hal tersebut seperti halnya amerika, dan juga pihan dewan keamanan PBB juga ikut membantuk untuk menyelesailakan konflik tersebut.

 Perang Irak dan Kuwait berawal pada Tanggal 2 agustus 1990 dimana perang ini terjadi karena adanya sebuah negara kecil yang memimiki kekayaan minyak yang melimpah sehingga irak ingin menguasainya. Sejarah menjelaskan bahwa antara irak dan kuwait sejak dahulu kala sering terjadi konflik. Konflik yang terjadi disini ialah perebutan sengketa perbatasan antara irak dan kuwait. Sebelum konflik ini terjadi irak dan kuwait sebelumnya adalah negara yang saling membantu dimana irak pada kala itu dimana irak dibantu oleh inggris melindungi kuwait dari iran (perang irak-iran) yang tejadia pada tahun 1980-1988. Pada saat itu inggris dalam menyelesaikan setiap konflik di irak, inggris tidak segan-segan untuk mengerahakan kekuatan militernya uantuk menbantu irak.

 Pada tahun 1961, kuwait memperoleh kemerdekaan dari inggris dan irak menolaknya dan menyatakan bahwa kuwait adalah bagian dibawah kekuasaan irak. Pada juli 1979 presiden ahmad hasan al-bakr mengundurkan diri dan digantikan oleh saddam husein. Disini saddam husein ditunjuk dan dipilih sebgai presiden dan juga sebagai ketua dewan revolusi irak. Dibawah kepemimpinan saddam husein inilah irak menjadi negara yang kaya dan kuat yang didukung oleh perekonomian dan yang berkembang pesat dan kekuatan angkatan perang yang besar. Dengan kekayaan dan kekuatan itulah saddam husein berambisi untuk menjadi orang nomer satu di dunia arab demikian juga sengketa perbatasan yang berkepanjangan antara irak dan kuwait yang pada akhirnya mengakibatkan invasi irak terhadap kuwait pada 2 agustus 1990 merupakan puncak arogansi dan ambisi saddam husein untuk menunjukkan kekuatan Irak.

 Selain itu latar belakang ekonomi yang dikarenakan perang selama kurang lebih 8 tahun dengan iran membuat negara irak yang dahulunya stabil dan kaya membuat perekonomian di irak menjadi terpuruk dan miskin.pada kurun waktu 8 tahun tersebut telah membuat irak mengalami kris ekonomi diaman irak mempunyai hutang luar negeri sebesar 100-120 US dolar sebelumnya irak memiliki cadangan devisa sebesar 30 milyar karena krisis ekonomi tersebut membuat irak berada pada posisi terpuruk dan berhutang kepada negara tetangganya. Salah satu dana yang masih dimiliki irak sampai saat itu uantuk pembaiayan negaranya hanyalah dari hasil penjualan minyak dimana penjualan ini hanya dihargai 10 milyar US dollar pertahunnya.

 Irak merasa harga tersebut terlalu kecil umtuk membiayai negaranya dimana pada saat itu irak membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan dan infrastruktur di irak. Penurunan harga jual minyak tersebut terjadi karena adanya pelanggaran kouta minyak yang dilakukan oleh pemerintah kuwait, arab, uni emirat arab dalam memproduksi minyak secara melimpah sehingga harga minyak menjadi turun drastis. Akhrnya irak yang hanya mengandalkan minyak mentahnya sebagai devisa negara harus mengalami kemerosotan yang sangat hebat atas insiden tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut pemirintah irak melakukan berbagai cara untuk keluar dari krisi tersbut salah satu yang dilakukan irak ialah mengurangi pegawai pemerintah dan juga tentara irak untuk realisasi penghematan nasional yang diinginkan saddam husein pada tahun 1989 pasca perang dengan iran. Dan irak juga meminta agar OPEC menaikkan harga minyak dan membatasi kouta bagi negara-negara pengekspor inyak tersebut. Irak juga meminta bantuan kepada arab Saudi dan kuwait untuk menbantu rekontruksi perekonomian irak, presiden saddam husein menegaskan apabila arab Saudi dan kuwait tidak memberikan bantuan dana kepada irak maka irak melakukan berbagai cara untuk memperolehnya.

 Akan teapi arab Saudi maupun kuwait menolak permintaan saddam husein sehingga membuat presiden saddam husein marah dan mengancam kedua negara tersebut dengan kekerasan apabila kedau negara tesebut menolak. Untuk memaksa mereka irak akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dengan memaksa mereka dengan kekerasan sekalipun.. Kesuliatan ekonomi inilah yang membuat irak melakukan berbagaia cara terhadap arab Saudi dan kuwait yang menolak untuk membantu perekonomian irak dan justru melawan balik irak. Hal inilah yang juga menjadi factor yang memicu keinginan irak untuk menginvasi kuwait.

 Kepentingan nasional irak pasca perang dengan iran adalah untuk memulihkan perekonmian nasional. Sebelum perang dengan iran pada tahun 1980-1988 irak merupakan negara yang kuat dan kaya dengan pasukan militernya dan ladang minyak yang dimiliki irak untuk pemasukan devisa negara, namun pasaca usai perang, irak menjadi negara miskin dan memiliki hutang luar negeri yang sangat besar. Irak harus menghidupi rakyatnya dan membiayai angkatan bersenjatanya membutuhkan dana yang cukup besar, dengan keadaan ekonomi yang seperti inilah yang menyebabkan irak meminta arab Saudi dan kuwait untuk membantu perekonimoan irak dengan cara mengahapus hutang luar negeri irak terhadap arab Saudi dan kuwait, mengurangi kouta minyak agar harga minyak menjadi lebih tinggi dan member bantuan berupa dana langsung untuk membantu memulihkan perekonomian irak. Kepentinagan dibidang ekonomi inilah yang tetap di pertahankan irak agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat irak pasca perang dengan iran.

 Salah satu cara yang dilakukan saddam husein untuk mempertahankan perekonomian irak adalah dengan cara meminta bantuan dengan kepada arab Saudi dan kuwait. Permintaan saddam husein ini tidak ditanggapi oleh kedua negara tersebut, bahkan kuwait yang merupakan tetangga terdekat irak dengan sombongnya permintaan saddam husein tersebut serta melawan dengan pernyataan-pernyataan penguasa kuwait sehingga membuat saddam husein marah dan sakit hati. Dan hal tersebutlah yang menjadi factor pemicu dan pendorong invasi irak terhadap kuwait.

 Hal tersebut karena didasari kepentingan nasional irak pasca perang dengan iran adalah untuk memulihkan perekonmian nasional. Sebelum perang dengan iran pada tahun 1980-1988 irak merupakan negara yang kuat dan kaya dengan pasukan militernya dan ladang minyak yang dimiliki irak untuk pemasukan devisa negara, namun pasaca usai perang, irak menjadi negara miskin dan memiliki hutang luar negeri yang sangat besar. Irak harus menghidupi rakyatnya dan membiayai angkatan bersenjatanya membutuhkan dana yang cukup besar, dengan keadaan ekonomi yang seperti inilah yang menyebabkan irak meminta arab Saudi dan kuwait untuk membantu perekonimoan irak dengan cara mengahapus hutang luar negeri irak terhadap arab Saudi dan kuwait, mengurangi kouta minyak agar harga minyak menjadi lebih tinggi dan member bantuan berupa dana langsung untuk membantu memulihkan perekonomian irak. Kepentinagan dibidang ekonomi inilah yang tetap di pertahankan irak agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat irak pasca perang dengan iran.

 Salah satu cara yang dilakukan saddam husein untuk mempertahankan perekonomian irak adalah dengan cara meminta bantuan dengan kepada arab Saudi dan kuwait. Permintaan saddam husein ini tidak ditanggapi oleh kedua negara tersebut, bahkan kuwait yang merupakan tetangga terdekat irak dengan sombongnya permintaan saddam husein tersebut serta melawan dengan pernyataan-pernyataan penguasa kuwait sehingga membuat saddam husein marah dan sakit hati. Dan hal tersebutlah yang menjadi factor pemicu dan pendorong invasi irak terhadap kuwait.[[3]](#footnote-3)

1. **Invasi Irak Terhadap Kuwait**

Dalam Perang Irak dan Iran banyak sumber yang mengatakan bahwa Irak lah yang memenangi perang tersebut namun kemenangan dalam perang Irak dan Iran bisa jadi merupakan kenangan manis bagi Sadam Hussein. Namun sekaligus menjadi boomerang baginya karena melambungkan keinginannya lebih jauh lagi. Setelah terjadinya perang Irak-Iran perekonomian Irak mengalami kemerosotan. Dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomiannya tersebut, kemudia dua tahun setelah perang Irak-Iran, Saddam menginvasi Kuwait yang sekaligus menjadi titik balik dari kejayaan Saddam Hussein. Irak berusaha menduduki Kuwait untuk menjadikannya provinsinya yang ke 19. Serbuan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Baghdad pada tanggal 2 Agustus 1990 ini berhasil membuat Kuwait bertekuk lutut hanya dalam waktu 9 jam. Kemudian Kuwait diproklamirkan sebagai provonsi Irak dengan nama Saddamiyat Al-Milta. Walaupun Kuwait sempat melakukan balasan kecil melalui udara terhadap posisi-posisi Irak. Mudahnya pasukan Irak menguasai Kuwait dikarenakan adanya informasi pada intelejen Kuwait bahwa Saddam Hussein tidak akan menggunakan kekuatan militer, sehingga membuat Kuwait terkecoh. Selain itu, dalam masalah kekuatan militer, yaitu dilihat dari personil dan peralatan militernya Kuwait dalam keadaan yang tidak sebanding dengan kekuatan Militer Irak. Belum lagi jika dilihat dari segi kemampuan dan pengalaman tempur mereka, Irak ljauh lebih unggul disbanding Kuwait.

Sebelum perang berlangsung, Saddam memperkirakan bahwa serangannya terhadap Kuwait tidak akan menerima reaksi keras dari masyarakat global. Namun ternyata perkiraannya salah, karena pada kenyataannya tiga hari setelah pengambilalihan Saddam Hussein terhadap Kuwait, Amerika Serikat dibawah pimpinan Presiden George. H. Bush mulai merancang aksi militer besar-besaran di kawasan tersebut. Pada tanggal 6 Agustus 1990 PBB menjatuhkan sanksi embargo ekonomi terhadap Irak menusul penyerangannya terhadap Kuwait. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1991, sesuai dengan deadline penarikan diri Irak dari Kuwait yang diberukan PBB, Irak diseerang oleh pasukan multinasional pimpinan Amerika perhatian penuh terhadap pemeriksaan senjata. Namun karena dianggap tidak menepati janjinya dengan mengusir Tim Pemeriksaan Senjata Nuklir PBB, UNSCOM (United Nations Special Commission) pada 16 Desember 1998, Amerika Serikat sekaigus Inggris melancarkan serangan udara empat haru atas Irak. Sebagai respon atas serangan tersebut, Saddam mentakan tidak akan mengizinkan tim inspeksi PB untuk memeriksa senjata di Irak dan akan menembak semua pesawat patrol asing di bagian Utara dan Selatan Irak.

 Perang Irak-Kuwait yang lebih dikenal dengan Perang Teluk II ini yang disusul oleh penyerangan pasukan multinasional dan sanksi ekonomi PBB terhadap Irak telah menyebabkan risaknya infrastruktur Irak dan semakin memperburuk kondisi perekonomian Irak.[[4]](#footnote-4)

1. **Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Irak**
2. **Resolusi DK PBB NO 670**

 Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak menyerang negara bagian Kuwait, Dewan Keamanan PBB menanggapi dengan cepat, mengeluarkan resolusi 670, yang mengecam invasi Irak dan menjatuhkan sanksi kepada Irak. Resolusi tersebut menyatakan bahwa semua negara harus mencegah:

1. Impor semua komoditas dan produk yang berasal dari Irak,
2. Setiap kegiatan oleh warganegara atau wilayah mereka yang akan mempromosikan ekspor atau pengiriman barang atau barang dari Irak, khususnya transfer dana ke Irak dan
3. Penjualan atau penawaran oleh warganegara atau wilayah mereka atau dengan menggunakan pengikut bendera mereka atas barang atau komoditas apa pun, termasuk senjata atau peralatan militer lainnya, baik yang berasal dari wilayah mereka tetapi tidak termasuk pasokan yang ditujukan untuk keperluan medis, dalam keadaan kemanusiaan, makanan, untuk orang atau badan di Irak.

 Sanksi tersebut sangatlah ketat dengan ditambahnya resolusi 670 mengintensifkan sanksi lebih lanjut dengan membangun embargo udara dan laut terhadap aset Irak dan Kuwait. Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa hal itu dapat dibenarkan, karena Irak telah melanggar Hukum Internasional. Irak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.Raison d'être adalah:

1. Invasi Kuwait; Juga dikenal sebagai Perang Irak-Kuwait, merupakan konflik besar antara Ba'athist Irak dan Negara Bagian Kuwait, yang mengakibatkan pendudukan Irak selama tujuh bulan di Kuwait, dan kemudian menyebabkan intervensi militer langsung oleh pasukan pimpinan Amerika Dalam Perang Teluk, dan pembakaran 600 sumur minyak Kuwait.
2. Senjata Pemusnah massal; Irak memulai penelitian tentang gas Mustard (dichloreathyl sulfate) pada tahun 1970an dan telah memproduksinya pada tahun 1980an pada tahun 1983, pemerintah AS menyadari bahwa Irak telah menggunakan gas mostar terhadap Iran dan Saddam sangat ingin meningkatkan persediaan senjata Irak, termasuk agen kimia. Pada tahun 1984, Irak telah mengembangkan kemampuan untuk memproduksi Tuban, Sarin, dan VX. Saddam juga menunjukkan minat yang terus-menerus dalam meningkatkan sistem rudalnya, namun tidak ada bukti bahwa ia menikmati kesuksesan besar. Namun, beberapa rudal scud ditembakan ke Israel dan Arab Saudi selama Perang Teluk Pertama namun mereka melakukan sedikit kerusakan.
3. Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia; Saddam Husain didakwa memiliki catatan HAM terburuk selama rezimnya di Irak yang mencakup, pemusnahan, penganiayaan, genosida, pemerkosaan, penyiksaan terburuk tanpa pengadilan.
4. **Resolusi DK PBB NO 687**

 Resolusi Dewan Keamanan ini meminta sebuah kesepakatan gencatan senjata permanen. Ini membutuhkan Irak untuk menghancurkan semua kemampuan senjata kimia, biologi dan nuklir serta rudal dengan jarak tempuh lebih dari 150 kilometer dan memungkinkan verifikasi oleh inspektur dari Komisi Sekjen PBB dan International Atomic Energy Agency (IAEA).[[5]](#footnote-5)

 Sekretaris Jenderal PBB pada pertengahan tahun 1990an, Boutros-Ghali menggambarkan Resolusi Dewan Keamanan 687, yang mewakili "salah satu keputusan paling kompleks dan paling jauh yang pernah diambil oleh dewan, sebenarnya adalah teks terpanjang yang pernah diadopsi oleh Dewan tersebut, resolusi tersebut berusaha 'melibatkan Irak secara kooperatif dalam tindakan pasca perang untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang abadi di wilayah ini. Setelah kekalahan Irak dalam perang Teluk Pertama, sanksi tersebut tidak lagi terlihat dalam konteks membebaskan Kuwait atau mengamankan perdamaian Dunia namun sebagai metode untuk menciptakan Irak, yang sesuai dengan kebutuhan kekuatan dominan di Dewan Keamanan. Ini diwujudkan dalam resolusi 687 yang mengharuskan Irak untuk:

1. Menerima asrama antara Irak dan Kuwait sebagaimana ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1963.
2. Hancurkan senjata pemusnah massal (senjata kimia dan biologi dan rudal balistik dengan jarak tertentu. Lebih besar dari 150 km, selain semua fasilitas penelitian dan pendukung yang dibutuhkan untuk perawatannya.
3. Lepaskan semua narapidana perang dan pihak ketiga yang dipenjara.
4. Kembalikan semua artefak, dokumen dan dana yang dicuri dari Kuwait. Sementara ekspor dan impor sepenuhnya bergantung pada kepatuhan di atas, embargo senjata tunduk pada kondisi yang kurang tepat seperti kemajuan umum Irak terhadap kontrol persenjataan.

 Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa hal itu dapat dibenarkan, karena Irak telah melanggar Hukum Internasional dengan menyerang Kuwait. Irak mengancam keamanan dan perdamaian internasional karena senjata pemusnah massal dan catatan hak asasi manusia yang mengganggu di negara Kuwait.

1. **Resolusi DK PBB NO 706**

Sebagai konsesi terhadap embargo penjualan minyak Irak, Resolusi 706 diadopsi yang memungkinkan Irak menjual minyak seharga 1,6 miliar dolar tanpa prasyarat. Namun, resolusi tersebut juga mengamanatkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengawasi pengeluaran dana yang didapat. Pemantauan bagaimana pendapatan digunakan dari penjualan kuantitas minyak yang terbatas dianggap oleh Baghdad menjadi pelanggaran atas kedaulatan Irak. Resolusi 706 dipandang dengan rasa takut dan penghinaan bukan hanya sebuah resolusi belaka yang memungkinkan Irak menjual minyak dalam jumlah minimal, melainkan sebagai sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mengubah Irak menjadi protektorat PBB. Meskipun Irak sangat membutuhkan uang dari penjualan minyak untuk memenuhi kebutuhan penduduk sipilnya, negara tersebut belum siap untuk menyerahkan kedaulatannya dengan sejumlah uang yang menurutnya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.[[6]](#footnote-6)

1. **Resolusi DK PBB NO 715**

 Untuk memantau dan mengesahkan kepatuhan Irak terhadap Resolusi 687 dan 715, Dewan Keamanan menunjuk sebuah Komisi Sekjen PBB, yang, dengan International Atomic Energy Agency (IAEA), ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menghancurkan rudal jarak jauh Irak, nuklir Peralatan, dan senjata kimia dan biologi. Dokumen yang ditandatangani oleh Ketua UNSCOM Rolf Ekeus dan oleh perwakilan IAEA dipresentasikan ke Dewan Keamanan pada bulan Oktober 1994, yang menyatakan bahwa mesin militer Irak telah hancur total. Dokumen tersebut juga memastikan bahwa sistem pemantauan jangka panjang berhasil dilakukan dan bahwa kerja sama Irak telah menunjukkan kemajuan besar. Karena itu, sesuai dengan Bab C Resolusi 687, Irak telah memenuhi kewajibannya. Ini memberi hak kepada Irak untuk segera menerapkan Resolusi 715 - Paragraf 22, yang akan memungkinkan Irak menjual minyak, "terutama agar rakyat Irak dapat hidup normal dan kesulitan ekonomi akan diringankan.

1. **Resolusi DK PBB NO 833**

 Resolusi Dewan Keamanan PBB no 833 mewajibkan Irak untuk mengakui Kemerdekaan Kuwait, Kedaulatan dan batas-batas yang dibatasi PBB. Yang lebih sulit daripada memenuhi Resolusi 833 adalah permintaan Dewan Keamanan bahwa Irak juga tunduk pada tuntutan tambahan Amerika Serikat mengenai Kuwait. Amerika Serikat menuntut agar pengakuan Irak atas Kuwait "diratifikasi oleh sebuah pemungutan suara di Majelis Nasional Irak, yang dilakukan pada tanggal 10 November 1994, bahwa secara resmi disetujui oleh partai Ba'th dalam sebuah keputusan yang ditandatangani oleh Saddam Hussein; dan bahwa keputusan tersebut dengan penempatannya dalam berita resmi partai, yang juga telah dilakukan.

**D. Fungsi Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Negara Irak**

 Dalam situasi yang ketat, sanksi ekonomi bisa menjadi cara paling efektif untuk membawa perubahan kebijakan di negara sasaran atau dalam kasus Irak, sebuah cara untuk memaksa kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, sebelum penggunaan sanksi dapat dianggap tepat, pertama perlu dari sudut pandang ekonomi bahwa beberapa persyaratan teoretis dasar bertemu dengan kenyataan di negara target. Irak, dalam hal ini, adalah kasus yang ideal. Pada dasarnya ada tiga persyaratan teoritis dasar yang telah membuat Irak menjadi kandidat ideal untuk sanksi ekonomi. Persyaratan ini, seperti yang ditetapkan oleh Gary Hufbauer dan Jeffrey J. Schott dalam Sanksi Ekonomi yang Ditinjau Kembali, adalah: (1) kerentanan ekonomi; (2) kapasitas terbatas untuk menghindari sanksi dan melakukan pembalasan secara ekonomi; (3) isolasi politik.[[7]](#footnote-7)

 Perekonomian Irak rentan karena ketergantungan yang kuat pada pasar luar baik untuk ekspor maupun impor. Dalam hal ekspor, ekonomi Irak sangat mudah terkena tekanan dari luar "karena sekitar 99 persen dari ekspornya adalah minyak dan sisanya terutama terdiri dari kurma, gas dan pupuk kimia". Dalam bidang impor, Irak sangat bergantung pada produk luar negeri. Sebelum tahun 1990, Irak mengimpor "makanan dan produk medis senilai $ 3-4 miliar per tahun".

 Irak memiliki kapasitas yang sangat terbatas untuk mendapatkan sanksi melalui penciptaan aliansi luar dan agak lemah dalam melakukan langkah pembalasan. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa Irak tidak memiliki produk yang dapat secara efektif melakukan pembalasan. Meskipun ekspor utama Irak adalah minyak, hanya satu dari sekian banyak produsen minyak di wilayah ini. "Bagian Irak dalam produksi minyak dunia pada tahun 1989 adalah 2,8 mbd (juta barel per hari) dengan total 23,7 mbd untuk semua negara OPEC". Meski produsen utama, dengan Irak tidak ada kelangkaan minyak di pasaran.

 Akhirnya, karena dukungan internasional yang kuat untuk sanksi ekonomi, Irak juga menemukan dirinya dalam posisi yang sangat terisolasi. Yang lebih penting lagi, sanksi ekonomi penuh, yang berarti bahwa mereka termasuk boikot, embargo, dan pembekuan aset keuangan di luar negeri. Aspek terakhir ini sangat penting karena sebagian besar aset Irak ditahan di bank asing dan investasi sebelum pecahnya Perang Teluk. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Presiden Bush menandatangani sebuah perintah eksekutif yang membekukan aset Irak di Amerika Serikat. Dia juga membekukan aset Kuwait sebelum mereka bisa ditangkap oleh pihak berwenang Irak. Tindakannya segera diikuti oleh kebanyakan pemerintah Barat lainnya. Pada hari yang sama Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi 660, secara formal mengecam invasi Irak ke Kuwait dan menuntut penarikan segera semua kekuatannya. Bab ini memberikan Dewan Keamanan "kekuatan sweeping untuk mencegah tindakan agresi termasuk sanksi ekonomi atau tindakan oleh pasukan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional".[[8]](#footnote-8)

1. Negara Republik Irak (Al Jumhuriyah al Iraqiyah) https://id.scribd.com/doc /80773212/Negara-Republik-Irak diakses pada tanggal 12 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Iraq <http://www.everyculture.com/Ge-It/Iraq.html#ixzz4j7wizlfd> diakses pada 12 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Cons Coughlin, Saddam-His Rise and Fall, Ecco-Harper Perennial, New York, 2002, hal 247 [↑](#footnote-ref-3)
4. Said K. Abrush, Saddam Husein-The Politic of Revenge, Bloombury, New York-London, 2000, hal 66 [↑](#footnote-ref-4)
5. Security Council Resolution 687: Iraq-Kuwait [http://peacemaker.un.org/iraqkoweit- resolution687](http://peacemaker.un.org/iraqkoweit-%09resolution687) diakses pada 1 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. Resolution 706 (1991) of 15 August 1991 <http://www.refworld.org/docid/3b00f1670.html> diakses pada 14 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hufbauer, Gary Clyde. 2007. Economic Sanctions Reconsidered. Peterson Institute, Washington. hal 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. UN Sanctions Against Iraq: Sanctioned Suffering <http://www.iraqwar.org/impossible.htm> diakses pada 12 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-8)